
Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani

Volume 9, Nomor 2 (April 2025)

ISSN 2541-3937 (print), 2541-3945 (online)

<https://www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis>

DOI: 10.30648/dun.v9i2.1505

Submitted: 27 September 2024	Accepted: 19 November 2024	Published: 9 Maret 2025
------------------------------	----------------------------	-------------------------

Gereja di Ruang Publik Indonesia Berdasarkan Pemikiran A.A. Yewangoe

Alosius Des Afriando Sinuraya

Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta

sinurayaalosius@gmail.com

Abstract

A.A. Yewangoe through his thoughts can be said to be a theo-nationalist figure because of his ability to integrate Christian teachings with the socio-cultural context of Indonesia in an effort to build a just and dignified democratic society. In this regard, this study focuses on Yewangoe's intellectual, theological, and ecclesiological analysis in responding to social, political, and democratic issues in Indonesia. Emphasis is placed on how Yewangoe integrates Christian teachings with Indonesian socio-cultural values to create a democratic society. Yewangoe emphasizes that the church has an active role in creating a just social order, by combining Christian values and local wisdom of Indonesian society. This idea encourages the church and Christians to be more reflective about their responsibilities in the public sphere, while at the same time criticizing the view that separates the church from social life. Thus, Yewangoe's thoughts offer a significant perspective on the role of the church in the formation of a more just and dignified Indonesian society.

Keywords: Kingship of God; missio Dei; Pancasila; presentia

Abstrak

A.A. Yewangoe melalui pemikirannya dapat dikatakan sebagai tokoh teo-nasionalisme karena kemampuannya mengintegrasikan ajaran Kristen dengan konteks sosio-kultural Indonesia dalam upaya membangun masyarakat demokratis yang adil dan bermartabat. Sehubungan dengan ini, penelitian ini berfokus pada analisis intelektual, teologis, dan eklesiologis Yewangoe dalam merespons isu-isu sosial, politik, dan demokrasi di Indonesia. Penekanan diberikan pada bagaimana Yewangoe mengintegrasikan ajaran Kristen dengan nilai-nilai sosio-kultural Indonesia untuk menciptakan masyarakat demokratis. Yewangoe menegaskan bahwa gereja memiliki peran aktif dalam menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan, dengan memadukan nilai-nilai Kristiani dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Gagasan ini mendorong gereja dan umat Kristen untuk lebih reflektif terhadap tanggung jawab mereka di ruang publik, sekaligus mengkritisi pandangan yang memisahkan gereja dari kehidupan sosial. Dengan demikian, pemikiran Yewangoe menawarkan perspektif yang signifikan bagi peran gereja dalam pembentukan masyarakat Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.

Kata Kunci: demokrasi; Kerajaan Allah; misi Allah; Pancasila; presensia

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan mengkaji pemikiran A.A. Yewangoe selama kurun waktu 21 tahun sejak tahun 2002 hingga 2023. Dalam kurun waktu tersebut, Yewangoe banyak menyumbangkan pemikiran tentang bagaimana gereja berperan di ruang publik dalam konteks sosio-kultural Indonesia. Dalam kaitan ini, fokus utama penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap kontribusi intelektual, teologis, dan eklesologis Yewangoe dalam tema-tema tertentu yang relevan.

Akhir-akhir ini, gereja-gereja di Indonesia menunjukkan perhatian yang besar dalam penerapan nilai-nilai Kristiani ke dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, politik, demokrasi, pendidikan, dan lain-lain. Gereja-gereja merasakan urgensi untuk terlibat aktif dalam ranah publik guna memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap isu-isu kebangsaan. Dalam konteks ini, banyak pendeta dan umat Kristen turut serta dalam lembaga-lembaga sosial, politik, dan pemerintahan, dengan fokus pada masalah ketidakadilan, pemeliharaan demokrasi, dan pembangunan eko-

nomi. Partisipasi tersebut memiliki tujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial, memastikan keberlangsungan sistem demokrasi, serta memperjuangkan kesejahteraan dalam konteks yang lebih luas.¹

Meski demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh gereja-gereja dan umat Kristen di Indonesia, terutama dalam hal memahami dan memosisikan diri di tengah dinamika politik dan sosial yang ada. Sebagai contoh, gereja sering menghadapi tantangan dalam merespons meningkatnya intoleransi agama di masyarakat. Kasus-kasus penutupan gereja atau penolakan izin mendirikan tempat ibadah menunjukkan adanya konflik antara kebebasan beragama dan tekanan sosial-politik dari kelompok-kelompok mayoritas. Yang terbaru, jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) di Binjai, Sumatera Utara dibubarkan paksa oleh masyarakat ketika tengah beribadah. Insiden itu terjadi karena jemaat gereja beribadah di lokasi yang tidak memiliki izin rumah ibadah.² Selain itu, realitas polarisasi masyarakat di Indonesia, dan polarisasi itu ditandai oleh kasus penistaan agama dan konflik kepentingan.³

¹ Bambang Budijanto, *Evangelical and Politics in Indonesia: The Case of Surakarta*, ed. David H. Lumsdaine (New York: Oxford University Press, 2009), 16.

² Nizar Aldi, "Duduk Perkara Jemaat Gereja Di Binjai Dibubarkan Paksa Saat Beribadah," *detik Sumut*, 2023, <https://www.detik.com/sumut/berita/>

d-6751029/duduk-perkara-jemaat-gereja-di-binjai-dibubarkan-paksa-saat-beribadah.

³ Danang Kurniawan, *Politik Ketakutan Dan Harapan Refleksi Kritis Dalam Bingkai Teologi Publik Bagi Masyarakat Multiagama Indonesia Untuk Melawan Rasa Takut Kolektif Dan Polarisasi*

Terkait hal tersebut, para teolog di Indonesia terus aktif mencari gagasan dan kerangka pemikiran yang dapat memperkuat komunitas gereja serta mendorong umat Kristen untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial dan ruang publik.⁴ Namun, dalam studi literatur yang dilakukan terkait penelitian ini, saya menemukan bahwa banyak pandangan yang masih mengandalkan pemikiran teolog Barat atau asing, dalam menjelaskan peran gereja di ruang publik, seperti Karl Barth,⁵ Stanley Hauerwas,⁶ dan Jürgen Habermas.⁷ Para pemikir besar ini lebih menekankan pentingnya keterlibatan gereja dan umat Kristen dalam konteks Barat atau di luar Indonesia.

Artikel ini menawarkan analisis pemikiran Yewangoe, yang mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani dengan nilai-nilai sosio-kultural Indonesia dalam kontribusi gereja di ruang publik. Penelitian ini mengangkat pertanyaan utama: Bagaimana Yewangoe mengintegrasikan nilai-nilai sosio-kultural Indonesia dengan ajaran Kristen dalam upa-

ya membangun masyarakat yang demokratis dan adil, khususnya dalam konteks isu-isu sosial, politik, dan demokrasi di Indonesia? Saya berargumen bahwa refleksi kritis Yewangoe tentang peran gereja dalam ruang publik—terutama dalam kaitannya dengan konteks sosio-kultural Indonesia dan ajaran Kristen—menyediakan perspektif teologis yang signifikan bagi pembangunan masyarakat yang demokratis dan adil. Namun, terdapat kritik terhadap relevansi dan penerapan gagasan Yewangoe di gereja-gereja lokal Indonesia yang menghadapi tantangan kontekstual berbeda.

Lebih lanjut, sebagai seorang teolog dan tokoh nasional Indonesia yang kritis terhadap pemerintahan rezim otoriter Orde Baru,⁸ Yewangoe secara kritis menyampaikan pemikirannya tentang hubungan antara agama dan negara dalam konteks Pancasila. Ia menyoroti peran gereja tidak hanya sebagai komunitas religius yang pasif tetapi juga bisa berkontribusi secara aktif dan luas dalam mewujudkan tatanan sosial yang le-

(Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2023), 1.

⁴ Hariman Pattianakotta, "Becoming Public Congregation: Being Church as Missional, Relational, and Incarnational in the Public Space," *Theologia in Loco* 3, no. 1 (April 30, 2021): 1–24, <https://doi.org/10.55935/THILO.V3I1.210>.

⁵ Hendra Winarjo, "Gereja Sebagai Saksi Kristus Di Ruang Publik," *Jurnal Amanat Agung* 19, no. 1 (2023): 1–23, <https://doi.org/10.47754/JAA.V19I1.615>.

⁶ Calvin Bangun, "Teologi Publik Stanley Hauerwas Dan Penerapannya Dalam Konteks Di Indonesia," *Verbum Christi: Jurnal Teologi Reformed Injili* 2, no. 1 (June 5, 2015): 153–77, <https://doi.org/10.51688/VC2.1.2015.ART6>.

⁷ Gusti A. B Menoh, *Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan Antara Agama Dan Negara Dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 17.

⁸ Andreas A. Yewangoe, *"Civil Society" Di Tengah Agama-Agama* (Jakarta: PGI, 2009), vii.

bih adil dan demokratis.⁹ Oleh karena itu, melalui analisis terhadap pemikiran-pemikirannya, penelitian ini dapat berkontribusi menjadi referensi atau basis teologis yang layak berkaitan dengan isu keterlibatan politis gereja dalam konteks Indonesia.¹⁰

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, saya menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan mengandalkan pemikiran-pemikiran Yewangoe yang telah dipublikasikan sejak 2002 hingga 2023. Dalam hal ini, pemikiran-pemikirannya tersebut merupakan refleksi kritis yang pernah ia sampaikan dalam berbagai seminar dan ceramah, baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga relevan dengan konteks dan pergumulan yang dihadapi Indonesia. Namun demikian, mengingat adanya keterbatasan ruang lingkup penelitian ini dan luasnya pemikiran Yewangoe, saya memfokuskan kajian ini pada beberapa aspek penting saja. Dalam hal ini, tema-tema yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: 1) misi gereja sebagai presensia di tengah masyarakat majemuk; 2) gereja dan Pancasila; 3) Kristen dan Islam di Indonesia; serta 4) gereja dalam proses demokratisasi di Indonesia.

Dalam pembahasan, saya lebih dulu memaparkan kehidupan dan karya Yewangoe sebagai seorang teolog dan tokoh nasional yang menaruh perhatian besar terhadap isu-isu sosial di Indonesia. Pada bagian ini, dibahas secara khusus beberapa aspek penting dari kehidupan dan karya Yewangoe, terutama yang berkaitan dengan karya dan kiprahnya di ranah publik. Lebih lanjut, saya memaparkan pemikiran Yewangoe tentang misi gereja sebagai presensia, dengan fokus pada pemikiran Yewangoe tentang panggilan gereja di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah mendirikan *the kingship of God*, bukan *the kingdom of God*. Selanjutnya, saya menjelaskan konteks gereja-gereja di Indonesia dalam bingkai Pancasila. Dalam hal ini, diuraikan pandangan Yewangoe yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan landasan utama bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, termasuk gereja, dalam dinamika politik dan sosial. Informasi ini penting untuk menjelaskan Pancasila sebagai falsafah hidup segenap bangsa Indonesia. Dari sini, dijelaskan pandangan Yewangoe tentang relasi Kristen dan Islam di Indonesia, khususnya dalam bingkai kerukunan di Indonesia. Selanjutnya, saya memaparkan pemikiran Yewangoe

⁹ Rudy Harold, "Peran 'Teologi Sosial' Gereja Protestan Indonesia Di Gorontalo (GPIG) Dalam Menanggapi Masalah Kemiskinan," *Jurnal Jaffray* 15, no. 1 (March 21, 2017): 131–47, <https://doi.org/10.25278/jj71.v15i1.230>.

¹⁰ Leonard Hale, *Diutus Ke Dalam Dunia: Menyelisik Teologi Abineno Dan Kontribusinya Bagi Gereja-Gereja Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 70.

tentang gereja dalam proses demokratisasi Indonesia, dengan fokus pada bagaimana kontribusi gereja dalam membentuk tatanan sosial yang demokratis. Dalam konteks ini, dijelaskan panggilan gereja dan umat Kristen di Indonesia dalam mewujudkan cita-cita demokrasi Indonesia dengan mendukung prinsip-prinsip Pancasila dan terlibat dalam dialog sosial yang membangun. Pada bagian terakhir, saya menguraikan refleksi kritis terhadap kontribusi pemikiran Yewangoe mengenai peran gereja dalam ruang publik, serta menyajikan kritik terhadap gagasan-gagasannya dalam kaitan implementasinya di aras gereja lokal. Hal ini sebagai upaya memperkaya perspektif dan memungkinkan kita melihat pandangan Yewangoe dari sudut pandang yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hidup dan Karya A.A. Yewangoe

Yewangoe, lahir di Mamboru, Sumba, Nusa Tenggara Timur, 31 Maret 1945. Ia mendapat gelar Sarjana Teologi (S.Th) dari STT Jakarta, 1969. Ia ditahbiskan sebagai Pendeta Gereja Kristen Sumba (GKS), dan pernah ditugaskan sebagai dosen pada Akademi Teologi Kupang (ATK) tahun 1971 (sekarang: Fakultas Teologi Universitas Kristen Artha Wacana).¹¹

¹¹ Andreas A. Yewangoe, *Hidup Dari Pengharapan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 296-97.

¹² Yewangoe, "Civil Society" Di Tengah Agama-Agama, vii.

Dapat dikatakan, bahwa pikiran-pikiran teologis Yewangoe adalah respons kritis tentang peran gereja dalam ruang publik dengan belajar dari pengalaman dan kondisi politik pada era Orde Baru.¹² Ia berpendapat bahwa Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai ideologi pembangunan yang, sayangnya, hanya diterapkan sebatas permukaan saja. Kekecewaannya jelas melalui catatannya yang mengatakan bahwa "Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila" yang diusulkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) pada saat itu dan kemudian menjadi inti dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) hanya dipergunakan sebagai slogan belaka. Dalam kaitan ini, menurut Yewangoe, rezim Orde Baru berupaya mengindoktrinasi seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi Pancasilais, namun pendekatannya sering kali bersifat indoktrinatif dan tidak efektif. Program penataran P4, misalnya, dianggap lebih banyak membuat rakyat jenuh dan tidak jarang dilakukan secara seremonial demi kepentingan pribadi seperti kenaikan pangkat.¹³

Dalam perjalanan sejarah gereja Indonesia modern, Yewangoe sebagai teolog dan tokoh nasional sangat signifikan dalam membentuk pemikiran teologi publik dan keterlibatan gereja dalam isu-isu sosial-

¹³ Andreas A. Yewangoe, *Perjalanan Panjang Dan Berliku, Mencapai Indonesia Yang Adil Dan Beradab* (Yogyakarta: Institut DIAN, 2015), 167-68.

politik terutama setelah runtuhnya Orde Baru. Yewangoe secara khusus dikenal luas karena kontribusinya dalam merumuskan pendekatan teologis yang mendorong peran aktif gereja dalam membela keadilan sosial dan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Ia menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, sembari mengkritik praktik-praktik kekuasaan yang bersifat otoriter. Dalam pandangannya, Pancasila harus diterapkan dalam konteks politik dan sosial Indonesia sebagai penegasan terhadap penolakan terhadap otoritarianisme. Ia menyebutkan ini adalah sebagai bagian rasa nasionalisme gereja terhadap bangsa dan negara Indonesia.¹⁴

Dalam ranah nasional, Yewangoe pernah menjabat sebagai Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) selama dua periode, yaitu 2004-2014. Selama kepemimpinannya, ia berperan dalam memperkuat suara gereja dalam dialog sosial-politik, memperjuangkan hak asasi manusia, serta mendorong gereja untuk menjadi agen perubahan sosial di Indonesia pasca-Orde Baru. Pemikirannya tentang teologi dan peran gereja dalam konteks Indonesia tersebut terus memberikan warna dalam perkemba-

ngan gereja dan teologi publik hingga saat ini.

Misi Gereja Sebagai Presensia

Misi gereja sebagai presensia dalam konteks Indonesia merupakan salah satu pemikiran khas Yewangoe. Dalam hal ini, Yewangoe memahami bahwa misi gereja dalam masyarakat majemuk adalah untuk hadir sebagai presensia, bukan sebagai upaya kristenisasi seperti yang dipahami dalam konteks zending, misalnya.¹⁵ Sehubungan dengan itu, Yewangoe lebih menekankan “*Missio Dei*,” bukan “*Missio Ekklessiae*” sebagai lembaga. Dalam hal ini, gereja dan umat Kristen diajak untuk tidak hanya terpaku kepada Matius 28:18-20, tetapi juga Matius 22:37-40 (Hukum Kasih) dan Matius 25:31-46 (Penghakiman Terakhir). Dalam pengertian ini, menurutnya gereja di Indonesia hadir secara bersama-sama dengan agama lain untuk ikut berkontribusi dan menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan, seperti ketidakadilan, kemiskinan, radikalisme, dan lingkungan hidup.¹⁶

Lebih lanjut, Yewangoe menjelaskan “presensia” dalam kaitan gereja dan pekabaran Injil di tengah masyarakat maje-

¹⁴ Andreas A. Yewangoe, “Menghargai Kembali Rasa Nasionalisme Kita,” in *Berteologi Dalam Sejarah*, ed. Asteria Arironang and Sylvana Apituley (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023), 34-35.

¹⁵ Ebenhaizer I. Nuban Timo, *Meng-Hari-Ini-Kan Injil Di Bumi Pancasila: Bergereja Dengan Cita*

Rasa Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 245.

¹⁶ Andreas A. Yewangoe, *Allah Mengizinkan Manusia Mengalami DiriNya, Pengalaman Dengan Allah Dalam Konteks Indonesia Yang BerPancasila* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 120.

muk. Ia berargumen bahwa “presensia” tidak boleh diartikan secara pasif, artinya seakan-akan berdiam diri saja, tanpa melakukan apa pun. Presensia justru sebaliknya. Ia adalah aksi proaktif, yang memperlihatkan solidaritas penuh terhadap semua orang, bahkan empati dengan masyarakat yang di dalamnya gereja hadir. Dalam pengertian ini, terlihat bahwa nilai-nilai solidaritas dan empati merupakan inti dari misi gereja sebagai presensia, dan bukan melakukan kristenisasi. Yewangoe merujuk kepada Yeremia 29:7, “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.” Artinya, gereja melakukan hal-hal yang mestinya merupakan kepentingan bersama di dalam masyarakat (polis). Gereja menjadi proaktif di dalam memperjuangkan keadilan apabila ketidakadilan menjadi gaya hidup di dalam masyarakat. Selain itu, gereja memperjuangkan kemerdekaan beragama dan beribadah ketika orang banyak (bukan hanya Kristen) dilecehkan.¹⁷

Gereja dan Pancasila

Menurut Yewangoe, Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia yang

menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, Pancasila memberikan kedaulatan kepada setiap individu dan komunitas, termasuk gereja, untuk berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Pancasila juga dipandang sebagai ideologi terbuka yang mampu menerima nilai-nilai baru dalam mewujudkan masyarakat berkeadaban (*civil society*) di Indonesia.¹⁸

Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pancasila mestilah dipahami sebagai suatu kesatuan. Menurut Yewangoe, kecenderungan-kecenderungan intoleransi yang ada disebabkan oleh pemahaman dari pengalaman keliru terhadap Pancasila.¹⁹ Sehubungan dengan itu, perlu terus dipahami bahwa sila-sila yang terdapat dalam Pancasila tidak boleh dilepaskan satu terhadap yang lainnya. Dalam kaitan ini, menurut Yewangoe ada bahaya kalau sila-sila itu dilepaskan satu terhadap lainnya. Sebagai contoh, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa jika dilepaskan dari Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab akan berbahaya. Seseorang akan sangat saleh dalam beragama namun tidak mengindahkan sikap berke-

¹⁷ Yewangoe, *Hidup Dari Pengharapan*, 59.

¹⁸ Yewangoe, *Allah Mengizinkan Manusia Mengalami DiriNya, Pengalaman Dengan Allah Dalam Konteks Indonesia Yang BerPancasila*, 384.

¹⁹ Yewangoe, 382.

adaban. Akibatnya, bukan tidak mungkin yang bersangkutan membunuh orang sambil menyerukan nama Tuhan. Selain itu, contoh lainnya, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa jika dilepaskan dari sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, akan mengantar seseorang menyerahkan matanya ke surga tanpa peduli di sampingnya. Sementara itu, dalam kehidupan sehari-hari ada yang justru merindukan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁰

Lebih lanjut, Yewangoe menjelaskan bahwa Pancasila menjadi sikap hidup dan menjadikannya sebagai sebuah panggilan besar oleh setiap orang dan komunitas yang ada, termasuk gereja.²¹ Dalam pengertian ini, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak mengenal “negara agama” atau “agama negara.” Pancasila, sebagai sebuah ideologi bangsa, melindungi dan mengayomi semua agama, sekaligus memberi tempat pada kebebasan beragama bagi siapa saja.²²

Sehubungan dengan itu, Yewangoe berbicara tentang pelayanan gereja dalam masyarakat Pancasila. Bagaimana seharusnya orang Kristen memahami Pancasila secara teologis? Pertama-tama, menurutnya harus ditegaskan bahwa negara dan bangsa

ini adalah anugerah Tuhan. Negara dan bangsa yang tadinya belum ada sekarang tegak di atas pentas sejarah dunia. Oleh karena itu, selayaknya kita yakin bahwa Tuhan sendirilah yang menciptakan bangsa ini sebagaimana juga ditegaskan dalam alinea ketiga UUD 1945. Ini juga berarti bahwa Pancasila adalah anugerah Tuhan. Berdasarkan hal tersebut, Yewangoe menekankan kita tidak perlu ragu-ragu untuk mengatakan bahwa Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga anugerah Tuhan bagi bangsa ini. Dalam hal ini, konsekuensinya adalah kita perlu membela Pancasila sejauh tidak diselewengkan dalam penerapan peraksisnya.²³

Lebih lanjut, Yewangoe mengaitkan hukum yang terutama dalam Matius 22:37-40. Menurut tafsirannya, hukum kasih yang terdapat dalam teks tersebut juga terefleksi dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila adalah pancaran kasih Tuhan dalam konteks Indonesia. Dalam kaitan ini, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengacu secara vertikal kepada Tuhan, sedangkan sila-sila lainnya adalah merupakan aplikasi praktis secara horizontal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yewangoe mengharapkan, bahwa pemahaman ini mestinya

²⁰ Yewangoe, 378.

²¹ Yewangoe.

²² Andreas A. Yewangoe, *Agama Dan Kerukunan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 48.

²³ Yewangoe, *Allah Mengizinkan Manusia Mengalami DiriNya, Pengalaman Dengan Allah Dalam Konteks Indonesia Yang BerPancasila*, 121.

terus dikembangkan di masa-masa mendatang.²⁴

Sebagai umat Kristen yang juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia, kita terlebih dahulu memandang diri sebagai warga Indonesia yang memiliki nasib, cita-cita, dan tujuan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Yewangoe, itulah sesungguhnya inti dari Pancasila, yang secara sangat arif dan visioner ditemukan oleh pendiri negara kita ini. Maka, dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila akan menjamin kita, bukan saja untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, melainkan juga untuk terbuka satu sama lainnya. Dalam kerangka itulah, maka nilai-nilai agama (nilai-nilai Kristiani) tidak usah dipertentangkan dengan Pancasila. Nilai-nilai agama yang universal itu hanya dapat dipahami di dalam konteks tertentu, yang dalam konteks kita, Indonesia, adalah Pancasila. Sebaliknya, nilai-nilai Pancasila memperoleh sumber-sumbernya yang tidak pernah kering dari nilai-nilai agama.

Yewangoe berpendapat, bahwa sangat disayangkan jika Pancasila diperlakukan seperti tidak ada oleh gereja atau orang Kristen. Bahkan Pancasila “dituduh” sebagai penyebab berbagai kesulitan di negeri

ini. Anggapan seperti itu harus diluruskan. Lebih lanjut, Yewangoe menjelaskan terkadang kitalah yang menafsirkan Pancasila secara tidak benar, misalnya rezim Orde Baru telah membelokkan Pancasila guna mempertahankan kekuasaan yang penuh dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Oleh karena itu, tugas gereja dan umat Kristen sekarang adalah merevitalisasi nilai-nilai Pancasila berdasarkan nilai-nilai Kristiani yang kita miliki.²⁵

Kristen dan Islam

Yewangoe menempatkan relasi Kristen dan Islam dalam bingkai kerukunan umat beragama yang berdasarkan Pancasila. Ia melihat kemajemukan agama yang ada merupakan potensi besar yang justru dapat memajukan bangsa Indonesia.²⁶ Oleh karena itu, dalam konteks ini menurutnya, kerukunan merupakan panggilan iman bagi orang Kristen Indonesia.²⁷

Bagaimana melihat kerukunan umat beragama secara teologis? Yewangoe mengemukakan bahwa umat manusia adalah keluarga besar Allah. Rukun (Bahasa Arab) berarti “tiang.” Sama seperti dalam Bahasa Indonesia, tiang (tiang-tiang=*arkan*) adalah penopang sebuah bangunan rumah yang dihuni sekelompok orang yang diikat oleh

²⁴ Yewangoe, 121.

²⁵ Yewangoe, *Perjalanan Panjang Dan Berliku, Mencapai Indonesia Yang Adil Dan Beradab*, 39-40.

²⁶ Yewangoe, *Agama Dan Kerukunan*, 26-27.

²⁷ Yewangoe, 48-49.

kekeluargaan. Mereka semuanya mengacu pada adanya sebuah bangunan atau tatanan yang disebut umat atau *ummah*. *Ummah* yang pada mula-mula adalah kesatuan iman dan religius yang bermaksud memelihara serta menumbuhkembangkan hidup keagamaan orang-orang percaya dari segala bangsa dan bahasa, merupakan cerminan seluruh umat manusia sebagai keluarga besar Allah (*familia Dei*). Atas dasar itu, maka hubungan kasih sebagai keluarga antara Allah dan manusia merupakan hal yang sangat sentral dan hakiki dalam teolog Kristen bagi Yewangoe.²⁸

Sehubungan dengan itu, Yewangoe memahami bahwa kerukunan di antara umat beragama sebagai pencerminan dan perwujudan kasih setia Allah dalam Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Persekutuan itu terungkap melalui/di dalam gereja, atau juga disebut *ecclesia*, yaitu mereka yang dipanggil keluar dan diutus oleh Yesus Kristus untuk bersaksi tentang nama-Nya sampai ke ujung bumi (Kis. 1:8). Dalam kaitan ini, pengertian gereja sebagai *ecclesia* ia hubungkan dengan pengertian gereja sebagai Tubuh Kristus (Rm. 12:4-8; 1Kor. 12:12-31), yaitu menekankan tindakan membagi hidup dalam kepedulian dengan orang lain atau sesama ma-

nusia. Hal itu dilakukan bukan dengan cara agresif dan konfrontatif, tetapi komunikatif dan persuasif. Maka, dalam hal ini, menurut Yewangoe hubungan dialogis merupakan jalan terbaik untuk melaksanakan kesaksian, dalam pemahaman bahwa dialog antara Kristen dan Islam berarti percakapan di antara orang yang berkeluarga. Namun demikian, identitas Kekristenan tidak boleh dikaburkan dalam dialog atau pertemuan yang terjadi, karena justru dengan adanya kesadaran diri sendiri bahwa seseorang itu Kristen, terdapat kemampuan untuk mengasihi Allah dan sesama atau tetangga (Mat. 22:37-40).²⁹

Kita telah melihat bahwa Yewangoe menekankan pentingnya dialog dalam hubungan antara Kristen dan Islam. Ia juga menegaskan bahwa dialog tersebut harus berfungsi sebagai media untuk bersaksi, tanpa menjadikannya sebagai taktik untuk mengubah agama seseorang demi kepentingan Kristenisasi. Menurutnya, jika seseorang mengubah agamanya, itu haruslah merupakan pilihannya sendiri dengan mengandalkan kebebasannya.³⁰

Gereja dan Demokratisasi di Indonesia

Menurut Yewangoe, demokrasi bukan sekedar mengandalkan suara terbanyak. Dalam pengertian ini, menurut Yewangoe,

²⁸ Yewangoe.

²⁹ Yewangoe, 49.

³⁰ Yewangoe, *Hidup Dari Pengharapan*, 60.

suara terbanyak tidak selalu bertindih tepat dengan suara terbaik.³¹ Dalam hal ini, ia lebih memahami bahwa demokrasi adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.”³²

Lebih lanjut, Yewangoe menyadari bahwa sistem demokrasi bisa dimanipulasi, yaitu ketika terjadi tirani mayoritas misalnya. Bisa saja apa saja yang dikatakan mayoritas adalah baik, kendati merugikan kehidupan bersama sebagai bangsa yang masyarakatnya majemuk. Oleh karena itu, gereja perlu memastikan bahwa dalam upayanya berkontribusi terhadap pembangunan demokrasi, perhatian telah diberikan kepada hal-hal berikut. Apakah hak-hak asasi manusia telah dihormati: Apakah yang disebut kaum minoritas telah memperoleh hak-haknya? Menurut Yewangoe, tolok ukur sebuah demokrasi justru diukur dari apakah yang “kecil” telah memperoleh hak-haknya, bukan justru memfokuskan diri pada “yang besar”. Apakah kebebasan untuk berpendapat dan mengekspresikan pendapat dan iman kepercayaan dijamin? Apakah dengan sistem demokrasi sungguh-sungguh persoalan

bangsa yaitu kemiskinan dapat diberantas? Ini adalah demokrasi dengan moral dan etika menurut Yewangoe. Dalam hal ini, gereja mesti memberikan teladan bagaimana menerapkan perilaku demokratis itu dalam kehidupan sehari-harinya.³³

Sehubungan dengan itu, salah satu peran gereja dalam demokratisasi Indonesia adalah dalam hal keterlibatan gereja dalam politik. Menurut Yewangoe segala bentuk keterlibatan gereja dalam politik tidak boleh dilihat sebagai gereja dalam politik praktis. Gereja tidak membutuhkannya, karena gereja tidak mempunyai ambisi kekuasaan. Gereja hanya memprihatinkan dunia sebagai milik Allah dengan segala persoalan yang muncul di dalamnya, semisal ketidakadilan, ketidakbenaran, pelecehan terhadap HAM, penindasan, dan peremehen terhadap milik. Dalam dunia seperti inilah gereja melayani.³⁴

Lebih lanjut, ada yang menjadi keprihatinan Yewangoe tentang keterlibatan gereja dalam isu-isu demokratisasi di Indonesia, khususnya dalam hal politik. Ucapan Rasul Paulus dalam Roma 13 yang menyerukan agar menghormati dan menaati pemerintah seringkali diangkat sebagai bukti

³¹ Yewangoe, *Allah Mengizinkan Manusia Mengalami Dirinya, Pengalaman Dengan Allah Dalam Konteks Indonesia Yang BerPancasila*, 383.

³² Yewangoe.

³³ Andreas A. Yewangoe and Weinata Sairin, *Suara-Suara Menyruak Udara Serpihan-Serpihan*

Pemikiran Dipusaran Kehidupan Kekinian (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), 77-78.

³⁴ Andreas A. Yewangoe, *Iman, Agama, Dan Masyarakat* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 50.

bahwa gereja tidak boleh campur tangan dalam urusan yang bukan bagiannya (politik, hukum, dan negara). Yewangoe menegaskan bahwa orang lupa bahwa selain Roma 13 terdapat juga Wahyu 13 yang mengiasakan kekuasaan sebagai binatang buas yang keluar dari dalam laut yang selalu siap menerkam mangsanya. Oleh karena itu, dalam hal ini, gereja perlu bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan penguasa atau negara dan hal tersebut kiranya dapat terus menjadi pergumulan teologis gereja-gereja di Indonesia.³⁵

Pada bagian ini, Yewangoe mengarahkan perhatian kita kepada peran agama dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Dalam kaitan ini, peran agama dalam demokratisasi di Indonesia adalah saling bergandengan tangan dan bahu membahu menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang tertib, aman dan lestari serta pembangunan bangsa. Ini adalah wujud penegakan demokrasi dan kebangsaan.³⁶ Menurut Yewangoe Indonesia memang dikagumi oleh dunia karena merupakan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Di Indonesia juga Islam dan demokrasi bisa

“bertemu” secara damai, hal yang sulit sekali terjadi di negeri-negeri Timur Tengah saat ini karena konflik Israel-Palestina.³⁷ Karena itu, menurut Yewangoe sangat wajar juga apabila gereja mendukung demokrasi, bahkan melalui rumusan Pengakuan iman dan pengajarannya. Namun demikian, di sisi lain, yang menjadi pertanyaan kritis adalah seberapa demokratiskah Indonesia (gereja atau umat Kristen), dan apa saja konsekuensi dari penerapan demokrasi itu?³⁸

Ada tiga persoalan yang diungkapkan Yewangoe yang barangkali baik untuk dipakai mengevaluasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, ada tirani mayoritas. Dalam hal ini, tirani mayoritas bisa mewujudkan dalam mayoritas agama atau kelompok. Kedua, despotisme (sistem pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas) birokrasi karena masyarakat yang belum demokratis. Ketiga, apatisisme politik, yaitu sikap masa bodoh warga negara terhadap berbagai proses politik yang sedang berlangsung.³⁹ Menurut Yewangoe, keterlibatan orang Kristen dalam proses demokratisasi sangat penting, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Kekristenan. Hal ini mencakup partisipasi para politisi Kristen

³⁵ Yewangoe, 48-49.

³⁶ Yewangoe, *Agama Dan Kerukunan*, 22.

³⁷ Andreas A. Yewangoe, *Israel-Palestina Perseteruan Abadi? Sikap Gereja Menghadapi Konflik Timur Tengah* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), 1.

³⁸ Yewangoe, *Allah Mengizinkan Manusia Mengalami DiriNya, Pengalaman Dengan Allah Dalam Konteks Indonesia Yang BerPancasila*, 264.

³⁹ Yewangoe, 265.

dalam memasuki bidang politik. Dalam hal ini, hak-hak asasi manusia haruslah dihormati dan dijunjung tinggi sebagaimana nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri. Selain itu, demokrasi yang mengungkapkan kesetaraan dan kesejahteraan haruslah ditegakkan. Di mana pun gereja dan orang Kristen berada dan dalam keadaan apa pun, moralitas dan etika ini mestinya dikedepankan.⁴⁰

Apakah gereja yang merupakan kumpulan orang percaya memiliki peran dalam keseluruhan upaya pembangunan bangsa? Menurut Yewangoe, gereja jelas memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Hal ini memperlihatkan bahwa menurut Yewangoe gereja tidak hanya berurusan dengan aspek spiritual (teologi dan dogma), tetapi juga dalam proses demokratisasi Indonesia dan ruang publik lainnya. Melalui kontribusinya gereja dan orang Kristen dapat memperkuat nilai-nilai keadilan, partisipasi warga, dan kepedulian sosial yang mendukung terbentuknya tatanan demokrasi yang berkelanjutan.⁴¹

Di sisi lain, bernegara tentu tak lepas dengan sistem pemerintahan yang terirat dalam sistem demokrasi. Pada hakikatnya, sistem pemerintahan ini ada karena dibutuhkan oleh rakyat, yaitu untuk mengatur segala sesuatu yang harusnya dipenuhi,

memerdekakan, dan menyejahterakan. Di sinilah pentingnya demokratisasi menurut Yewangoe. Dalam hal ini, demokratisasi adalah proses pendemokrasian segenap rakyat, termasuk gereja dan orang Kristen, untuk turut serta memegang kendali sistem pemerintahan. Demokratisasi adalah bagian dari tangan rakyat yang memilih pemimpinnya, dan praktiknya disebut dengan istilah demokrasi. Aspek-aspek yang berkaitan dengan proses demokratisasi adalah politik, ekonomi, budaya, dan masih banyak lagi lainnya. Hingga pada akhirnya, segala yang sudah menjadi keputusan rakyat harus diikuti sesuai dengan sistem demokrasi. Secara tidak langsung, dapat dikatakan, kemerdekaan dan kesejahteraan bergantung pada demokratisasi ini. Dalam kaitan ini, apabila politik diartikan secara luas, maka panggilan pendeta dan gereja di bidang politik sebenarnya sangat signifikan, yaitu dengan menyampaikan kesaksian atau suara kenabian di bidang politik. Itulah suara gereja yang dipersonifikasikan oleh sang pendeta. Dengan demikian, peran gereja dalam bidang politik bukanlah politik kekuasaan tetapi politik moral.⁴²

Lebih lanjut, negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi hak asasi manusia, seperti Indonesia. Terkait hal ini,

⁴⁰ Yewangoe, 268.

⁴¹ Yewangoe, 129.

⁴² Yewangoe, *Perjalanan Panjang Dan Berliku, Mencapai Indonesia Yang Adil Dan Beradab*, 294.

Yewangoe menjelaskan bahwa dalam Alkitab, khususnya kitab Kejadian, kita menemukan penghargaan yang sangat tinggi kepada kemanusiaan serta hak-haknya. Di dalam kitab Kejadian kita membaca ada penjelasan yang menekankan kesatuan umat manusia yang merupakan anak-anak dari Bapa yang satu saja. Menurut tafsiran Yewangoe, ini berarti bahwa segala perlakuan buruk kepada seseorang merupakan penghinaan kepada Allah yang merelakan diriNya dijadikan gambaran dan citra oleh manusia (*imago dei*). Selain itu, kita juga membaca bagaimana Allah memberikan reaksi yang keras saat terjadi pembunuhan pertama atas manusia (Habel) oleh seorang manusia lainnya (Kain). Allah tidak akan membiarkan peristiwa seperti itu berlalu begitu saja. Allah pasti akan membalasNya. Dalam pengertian ini, menurut Yewangoe, perlakuan yang sewenang-wenang kepada manusia jelas memerkosa gambar Allah di dalam manusia itu sendiri, dan ini bukan bagian dari nilai-nilai demokrasi.⁴³

Kontribusi Pemikiran A.A. Yewangoe

Secara konseptual, pemikiran Yewangoe yang berfokus pada nilai-nilai Pancasila, kerukunan umat beragama, dan demokrasi

merupakan alternatif bagi peran gereja di ruang publik Indonesia. Pemikiran ini juga dapat dilihat sebagai kritik terhadap pandangan yang menekankan pemisahan antara ruang agama dan kehidupan sehari-hari, serta antara iman dan politik.⁴⁴ Yewangoe telah menjelaskan korelasi bagaimana gereja berperan di ruang publik pada konteks Indonesia. Dalam hal nilai kenegaraan dan kebangsaan, seperti Pancasila dengan nilai-nilai Kristiani yang dipegang oleh gereja. Menurut saya, konsep ini dapat disebut sebagai Teo-nasionalisme, yang berupaya memadukan nilai-nilai kenegaraan, kebangsaan, dan teologi Kristen dalam suatu kerangka holistik, sehingga menghasilkan perspektif tentang peran gereja dalam ruang publik. Dalam kaitan ini, Yewangoe ingin gereja menjadi Pancasilais. Dalam pengertian ini, Yewangoe menginginkan nilai-nilai Pancasila⁴⁵ juga menjadi falsafah yang dipegang juga oleh gereja, dan menurutnya mesti sejalan dengan ajaran gereja. Dalam hal ini, gereja dapat melihatnya dari perspektif teologis, misalnya masalah kemanusiaan, keadilan dan keberadaban, dan ini menjadi bidang teologi.

Selain itu, Yewangoe menekankan pentingnya dialog dalam konteks relasi

⁴³ Yewangoe, *Iman, Agama, Dan Masyarakat*, 222-23.

⁴⁴ J. Milburn Thompson, *Keadilan Dan Perdamaian Tanggung Jawab Kristiani Dalam Pembangunan Dunia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 367.

⁴⁵ Yewangoe, "Menghargai Kembali Rasa Nasionalisme Kita," 35.

Kristen dan Islam, bahkan sebagai sarana yang efektif dalam mengatasi konflik. Menurutnya, dialog bukan hanya menjadi alat untuk penyelesaian masalah, tetapi juga berfungsi sebagai wadah interaksi yang konstruktif antar berbagai pihak. Gagasan ini selaras dengan kearifan lokal Indonesia di mana tradisi dialog merupakan bagian integral dari kehidupan luhur masyarakat Indonesia yang mencerminkan rasa peduli dan toleransi. Sebagai contoh, polarisasi sosial dan politik identitas yang terjadi di Indonesia, termasuk konflik kepentingan berbasis agama, sering kali berpotensi memicu ketegangan, sebagaimana terlihat dalam konflik Ambon pada tahun 1999, yang melibatkan pertentangan antara umat Kristen dan Islam. Namun, dengan mengedepankan dialog sebagai medium penyelesaian, konflik tersebut dapat diminimalisasi. Dalam kasus Ambon, tokoh-tokoh agama dari kedua belah pihak memainkan peran kunci dalam mendorong proses rekonsiliasi, yang membuktikan bahwa dialog terbuka mampu menjadi jembatan penyelesaian konflik yang efektif di tengah kompleksitas pluralitas bangsa.⁴⁶

Lebih lanjut, dalam dunia akademis, pemikiran-pemikiran Yewangoe di atas ju-

ga kerap dijadikan rujukan utama ketika membahas topik-topik dalam ranah berteologi publik dalam konteks Indonesia, seperti yang menyangkut Pancasila, Kristen-Islam di Indonesia, dan demokrasi di Indonesia. Sebagai contoh, Ebenhaizer I. Nuban Timo dalam bukunya yang berjudul “Meng-Hari-Ini-Kan Injil di Bumi Pancasila.” Dalam kaitan ini, Timo merujuk pemikiran khas Yewangoe di atas terkait misi gereja dalam bentuk Pekabaran Injil (PI) dalam konteks Indonesia adalah presensia serta menolak kristenisasi.⁴⁷ Dalam hal ini, Timo sependapat dengan Yewangoe. Ia berargumentasi bahwa pemahaman misi gereja sebagai presensia merupakan upaya untuk merefleksikan solidaritas Allah dalam konteks Indonesia yang majemuk.⁴⁸

Lebih lanjut, menurut Timo, hal tersebut di atas mencerminkan sifat “*am*” gereja dalam konteks Indonesia, yang menekankan pentingnya moralitas dan etos hidup di atas aspek-aspek kelembagaan gereja. Dalam pengertian ini, dalam konteks Indonesia, “*am*” lebih bermakna sebagai kehadiran yang menghidupkan nilai-nilai luhur dan kebajikan daripada sekedar memperbanyak gedung-gedung ibadah yang mencolok.⁴⁹ Selain itu, Alter Imanuel Wowor yang meru-

⁴⁶ Burhanuddin Tidore, “Resolusi Konflik Berbasis Teologi Baku Bae Ambon (1999-2002),” *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 3, no. 2 (October 1, 2022): 212–35, <https://doi.org/10.53396/MEDIA.V3I2.111>.

⁴⁷ Timo, *Meng-Hari-Ini-Kan Injil Di Bumi Pancasila: Bergereja Dengan Cita Rasa Indonesia*, 245.

⁴⁸ Timo.

⁴⁹ Timo, 82.

juk pada pandangan teologi politik Yewangoe sebagai upaya mencari referensi atau basis teologis berkaitan dengan isu keterlibatan gereja dalam dunia politik pada konteks Indonesia juga sependapat dengan pemikiran Yewangoe bahwa politik bukanlah hal yang tabu bagi gereja.⁵⁰

Dari sini kita dapat melihat bahwa, secara akademis pemikiran Yewangoe turut mempengaruhi karya-karya teolog-teolog Indonesia dalam kaitan berteologi publik dalam konteks Indonesia. Selain itu, pemikirannya berkontribusi membuka diskusi-diskusi lebih lanjut tentang hubungan teologi dan Pancasila, kerukunan dan demokrasi Indonesia.

Kritik atas Pemikiran A.A. Yewangoe

Berdasarkan penjelasan gagasan Yewangoe, dapat dikatakan bahwa pemikirannya cenderung mengedepankan aspek moral dan etis, tetapi kurang mendalam dalam analisis struktural politik. Pendekatan ini, meskipun penting, tidak secara langsung menjawab kompleksitas struktur sosial-politik Indonesia yang sering menjadi hambatan bagi gereja dalam berperan di ruang publik. Misalnya, ketika gereja berhadapan

dengan sistem birokrasi atau kebijakan yang koruptif, pendekatan moral dan etis saja mungkin tidak cukup untuk mempengaruhi perubahan kebijakan secara nyata. Diperlukan pendekatan yang lebih politis dan struktural agar gereja dapat berkontribusi secara efektif dalam transformasi sosial-politik di Indonesia.⁵¹ Hal ini sejalan dengan pendapat Danang Kurniawan, sebagai seorang yang menaruh perhatian terhadap teologi publik. Ia berpendapat bahwa peran gereja dalam ruang publik mestinya sampai kepada pendekatan sistem dan struktur sebagai sebuah sikap kritis profetis gereja dalam ruang publik.⁵²

Selain itu, sebagai seorang teolog, gagasan Yewangoe sering kali menimbulkan pertanyaan, khususnya terkait pemikiran Yewangoe yang tampak kurang mengalami perkembangan yang signifikan, cenderung bersifat normatif, dan terkesan stagnan tanpa adanya pendekatan baru yang ditawarkan. Dengan kata lain, dalam kurun waktu 21 tahun, sebagian besar pemikiran Yewangoe cenderung bersifat memperkuat argumen-argumen yang telah diutarakan sebelumnya tanpa menawarkan perspektif yang baru dalam merespons dinamika sosial, politik, maupun tantangan yang dihadapi gere-

⁵⁰ Alter Imanuel Wowor, "Memaknai Politik Dalam Dua Matra A. A. Yewangoe: Suatu Basis Teologis Bagi Keterlibatan Gereja Dalam Dunia Politik Di Indonesia," *KURIOS* 9, no. 3 (December 27, 2023): 645–60, <https://doi.org/10.30995/KUR.V9I3.804>.

⁵¹ Trisno S. Sutanto, *Politik Kebinekaan. Esai-Esai Terpili* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 277.

⁵² Kurniawan, *Politik Ketakutan Dan Harapan Refleksi Kritis Dalam Bingkai Teologi Publik Bagi Masyarakat Multiagama Indonesia Untuk Melawan Rasa Takut Kolektif Dan Polarisasi*, 1, 8.

ja di ruang publik Indonesia. Sementara itu, situasi dan isu-isu sosial-politik dan pergumulan Indonesia dalam kurun waktu 21 tahun senantiasa mengalami perubahan yang signifikan.

Lebih lanjut, sebagai seorang teolog dan Pendeta di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), izinkan saya membagikan pengalaman pelayanan saya dalam kaitannya dengan evaluasi pemikiran Yewangoe sebagaimana yang telah dijelaskan. Sebagai seorang tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PGI selama dua periode (2004-2014), asumsi awal saya adalah ide-ide Yewangoe memiliki pengaruh yang luas bagi gereja-gereja anggota PGI, seperti GBKP.⁵³ Namun, faktanya dari pengalaman pelayanan yang didapatkan penerimaan dan implementasi gagasan-gagasan tersebut di kalangan gereja-gereja lokal di Indonesia, termasuk GBKP, kiranya perlu ditelaah lebih lanjut.

Di jemaat yang pernah saya layani misalnya, tidak banyak orang yang mengenal Yewangoe. Menurut hemat saya, hal ini disebabkan pemikiran Yewangoe lebih banyak menggumulkan isu-isu pada tingkat nasional atau pusat ibu kota saja (Jakarta) sehingga sering kali kurang relevan atau ti-

dak dapat diimplementasikan secara efektif oleh gereja-gereja di tingkat sinodal dan lokal yang memang memiliki kebutuhan dan pergumulan tersendiri.⁵⁴ Sebagai contoh, dalam konteks GBKP di Sumatera Utara, sinergi antara GBKP dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), khususnya dengan pemerintah daerah Kabupaten Karo, dilaporkan masih belum optimal. Misalnya, dalam upaya pemulihan masyarakat pasca-erupsi Gunung Sinabung, meskipun GBKP telah berinisiatif mendorong percepatan pemulihan, kurangnya respons dari pemerintah daerah sering kali menghambat implementasi berbagai inisiatif tersebut. Dalam kaitan ini, tentu dibutuhkan saran yang konkret dan praktis demi terjalannya kerjasama yang baik.⁵⁵

Lebih lanjut, meskipun Yewangoe mendorong gereja untuk terlibat aktif dalam isu-isu kenegaraan, termasuk peran gereja dalam menjaga pluralisme dan pengamalan Pancasila, implementasi gagasan ini di tingkat lokal GBKP tidak selalu berjalan efektif. Misalnya, ketika Yewangoe mengkritik ketidakadilan sosial di Indonesia, sedangkan gereja-gereja lokal di Sumatera Utara masih berfokus pada masalah internal gereja (keuangan, sumber daya manusia, dan or-

⁵³ Yewangoe, *Israel-Palestina Perseteruan Abadi? Sikap Gereja Menghadapi Konflik Timur Tengah*, 396.

⁵⁴ Yewangoe, "Civil Society" Di Tengah Agama-Agama, 43-49.

⁵⁵ "Garis Besar Pelayanan GBKP 2021-2025" (Moderamen, n.d.), 25.

ganisasinya) dan isu-isu sosial yang lebih mendesak di lingkungan mereka, seperti kemiskinan, akses pendidikan, atau pertanian. Pemikiran Yewangoe tentang politik nasional terasa jauh dari realitas sehari-hari jemaat di daerah lokal tersebut. Selain itu, di wilayah-wilayah seperti pedalaman Sumatera atau daerah-daerah dengan tantangan sosial yang berbeda dari perkotaan seperti Jakarta, gagasan Yewangoe tentang pluralisme dan demokrasi mungkin dianggap kurang relevan. Misalnya, di gereja-gereja kecil di daerah, permasalahan utama jemaat sering kali terkait dengan infrastruktur yang buruk atau akses terhadap layanan publik, yang berbeda dari isu-isu kenegaraan yang lebih besar yang dibahas di lingkup nasional oleh Yewangoe. Dalam hal ini, walaupun ada diskusi-diskusi isu-isu kenegaraan dan kebangsaan tak jarang dianggap hanyalah urusan para elit gereja atau pengurus gereja (Pena-tua, Diaken dan Pendeta) saja dan belum menjadi gerakan bersama di akar rumput.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemikiran Yewangoe, meskipun mencerminkan komitmennya terhadap pentingnya peran aktif gereja dalam tanggung jawab sosial di ruang publik Indonesia, belum menawarkan agenda konkret yang dapat diimplementasikan oleh gereja dalam konteks

lokal, melainkan lebih berfokus pada prinsip-prinsip umum saja. Terhadap hal ini, saya mengingat gagasan Kurniawan yang menekankan pentingnya agenda konkret yang konstruktif yang menekankan kepentingan komunitas Kristen (lokal) di ruang publik, dan gagasan-gagasan Yewangoe belum tampak jelas dalam konteks ini.⁵⁶

Lebih lanjut, fenomena di atas juga menunjukkan bahwa Yewangoe tampaknya belum sepenuhnya menyerap isu-isu mendalam yang dihadapi oleh sinode maupun gereja lokal. Akibatnya, gagasan-gagasannya terkadang terlihat kurang relevan dan operatif dalam konteks yang lebih spesifik. Selain itu, relitasnya adalah bahwa sinode dan gereja-gereja lokal memiliki peran penting dalam menerjemahkan gagasan-gagasan Yewangoe yang bersifat umum menjadi lebih spesifik dan konkret. Namun, dengan menempatkan pemikiran Yewangoe dalam konteks lokal yang lebih mendalam, kritik semacam ini dapat berfungsi sebagai masukan konstruktif yang memperkaya dan mengarahkan pengembangan gagasan-gagasannya agar menjadi lebih relevan dan aplikatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Yewangoe adalah seorang tokoh gereja dan tokoh nasional yang Pancasila-lais, berpikiran

⁵⁶ Kurniawan, *Politik Ketakutan Dan Harapan Refleksi Kritis Dalam Bingkai Teologi Publik Bagi*

Masyarakat Multiagama Indonesia Untuk Melawan Rasa Takut Kolektif Dan Polarisasi, 12.

kontekstual serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan dialog. Selama kurun waktu 21 tahun, pemikiran Yewangoe secara signifikan berkontribusi dalam memperkuat pemahaman gereja dan umat Kristen Indonesia mengenai peran mereka di ruang publik. Selain itu, Yewangoe memfokuskan pemikirannya pada upaya mengintegrasikan konsep teologi Kristen dengan nilai-nilai sekuler yang dianut oleh masyarakat Indonesia, seperti yang tercermin dalam Pancasila. Melalui gagasan-gagasannya, gereja dan orang Kristen diperkaya dalam memahami perannya sebagai agen sosial aktif di ruang publik Indonesia, baik dalam interaksi dengan masyarakat maupun dalam relasinya dengan pemerintah. Dengan demikian, Yewangoe secara signifikan memperkuat panggilan sosial gereja sebagai agen perubahan yang relevan dalam dinamika demokrasi, pluralisme agama, dan kebangsaan, terutama dengan menekankan pentingnya Pancasila sebagai fondasi etis bagi keberagaman dan keterlibatan publik umat Kristen di Indonesia. Namun demikian, keterbatasan pemikiran Yewangoe dalam menyentuh aspek-aspek kebutuhan gereja lokal menunjukkan adanya kesenjangan teologis antara pemikiran yang dikembangkan dengan kebutuhan gereja lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, Nizar. "Duduk Perkara Jemaat Gereja Di Binjai Dibubarkan Paksa Saat Beribadah." *detikSumut*, 2023. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6751029/duduk-perkara-jemaat-gereja-di-binjai-dibubarkan-paksa-saat-beribadah>.
- Bangun, Calvin. "Teologi Publik Stanley Hauerwas Dan Penerapannya Dalam Konteks Di Indonesia." *Verbum Christi: Jurnal Teologi Reformed Injili* 2, no. 1 (June 5, 2015): 153–77. <https://doi.org/10.51688/VC2.1.2015.ART6>.
- Budijanto, Bambang. *Evangelical and Politics in Indonesia: The Case of Surakarta*. Edited by David H. Lumsdaine. New York: Oxford University Press, 2009.
- Hale, Leonard. *Diutus Ke Dalam Dunia: Menyelisik Teologi Abineno Dan Kontribusinya Bagi Gereja-Gereja Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Harold, Rudy. "Peran 'Teologi Sosial' Gereja Protestan Indonesia Di Gorontalo (GPIG) Dalam Menanggapi Masalah Kemiskinan." *Jurnal Jaffray* 15, no. 1 (March 21, 2017): 131–47. <https://doi.org/10.25278/jj71.v15i1.230>.
- Kurniawan, Danang. *Politik Ketakutan Dan Harapan Refleksi Kritis Dalam Bingkai Teologi Publik Bagi Masyarakat Multiagama Indonesia Untuk Melawan Rasa Takut Kolektif Dan Polarisasi*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2023.
- Menoh, Gusti A. B. *Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan Antara Agama Dan Negara Dalam Masyarakat Postsekuler Menurut J urgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.

- Pattianakotta, Hariman. "Becoming Public Congregation: Being Church as Missional, Relational, and Incarnasional in the Public Space." *Theologia in Loco* 3, no. 1 (April 30, 2021): 1–24. <https://doi.org/10.55935/THILO.V3I1.210>.
- Sutanto, Trisno S. *Politik Kebinekaan. Esai-Esai Terpili*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.
- Thompson, J. Milburn. *Keadilan Dan Perdamaian Tanggung Jawab Kristiani Dalam Pembangunan Dunia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Tidore, Burhanuddin. "Resolusi Konflik Berbasis Teologi Baku Bae Ambon (1999-2002)." *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 3, no. 2 (October 1, 2022): 212–35. <https://doi.org/10.53396/MEDIA.V3I2.111>.
- Timo, Ebenhaizer I. Nuban. *Meng-Hari-Ini-Kan Injil Di Bumi Pancasila: Bergereja Dengan Cita Rasa Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Winarjo, Hendra. "Gereja Sebagai Saksi Kristus Di Ruang Publik." *Jurnal Amanat Agung* 19, no. 1 (2023): 1–23. <https://doi.org/10.47754/JAA.V19I1.615>.
- Wowor, Alter Imanuel. "Memaknai Politik Dalam Dua Matra A. A. Yewangoe: Suatu Basis Teologis Bagi Keterlibatan Gereja Dalam Dunia Politik Di Indonesia." *KURIOS* 9, no. 3 (December 27, 2023): 645–60. <https://doi.org/10.30995/KUR.V9I3.804>.
- Yewangoe, Andreas A. *Agama Dan Kerukunan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- . *Allah Mengizinkan Manusia Mengalami Dirinya, Pengalaman Dengan Allah Dalam Konteks Indonesia Yang BerPancasila*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- . *"Civil Society" Di Tengah Agama-Agama*. Jakarta: PGI, 2009.
- . *Hidup Dari Pengharapan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- . *Iman, Agama, Dan Masyarakat*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
- . *Israel-Palestina Perseteruan Abadi? Sikap Gereja Menghadapi Konflik Timur Tengah*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022.
- . "Menghargai Kembali Rasa Nasionalisme Kita." In *Berteologi Dalam Sejarah*, edited by Asteria Aritonang and Sylvana Apituley. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023.
- . *Perjalanan Panjang Dan Berliku, Mencapai Indonesia Yang Adil Dan Beradab*. Yogyakarta: Institut DIAN, 2015.
- Yewangoe, Andreas A., and Weinata Sairin. *Suara-Suara Menyeruak Udara Serpihan-Serpihan Pemikiran Dipusaran Kehidupan Kekinian*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.